

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Relasi kultural dalam penelitian ini dipahami sebagai hubungan antarorganisasi yang tidak semata-mata dibangun atas dasar kepentingan politik sesaat maupun kedekatan personal antaraktor, melainkan berakar pada identitas organisasi, sejarah bersama, nilai-nilai yang dianut, serta memori kolektif yang terus direproduksi melalui berbagai praktik organisasi. Pemaknaan tersebut berangkat dari kajian Andrea Casey mengenai hubungan antara *organizational identity* dan *organizational memory*. Casey menjelaskan bahwa identitas organisasi tidak terbentuk secara spontan, melainkan berkembang melalui sejarah, proses peringatan (*commemoration*), dan memori organisasi yang diwariskan dari waktu ke waktu sehingga membentuk cara anggota memahami organisasinya serta membangun rasa memiliki terhadap organisasi tersebut. Casey menyatakan bahwa:

Organizational Identity and Memory analyzes the relationship between organizational identity and organizational memory, in particular history and commemoration.”³³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sejarah dan memori organisasi merupakan unsur penting dalam pembentukan identitas organisasi, yang kemudian menjadi dasar bagi para anggotanya dalam membangun makna bersama (*shared meanings*) dan mempertahankan keterikatan terhadap organisasi.

Argumen tersebut diperkuat oleh Rowlinson, Casey, Hansen, dan Mills (2014) yang menjelaskan bahwa organisasi tidak hanya menyimpan sejarah, tetapi secara

³³ Casey, A. (2019). *Organizational Identity and Memory: A Multidisciplinary Approach*. London: Routledge.

terus-menerus membangun identitas dan budayanya melalui proses mengingat masa lalu. Mereka menyatakan bahwa:

*“Knowingly or unknowingly, and to varying degrees, organizations continually construct their cultures and identities through memory and history.”*³⁴

Dengan demikian, sejarah organisasi bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan menjadi sumber nilai, identitas, dan makna yang memengaruhi cara anggota organisasi membangun hubungan dengan organisasi lain. Dalam konteks penelitian ini, relasi antara PERSIS dan Partai Bulan Bintang dipahami sebagai relasi kultural karena hubungan tersebut dibentuk oleh sejarah perjuangan yang saling berkaitan, identitas keislaman yang relatif sejalan, memori kolektif mengenai kedekatan dengan Masyumi, tradisi dakwah, jaringan kader, serta nilai-nilai yang terus dipelihara melalui interaksi antartokoh maupun antaranggota organisasi. Oleh karena itu, istilah *relasi kultural* dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai konsep yang diadopsi secara langsung dari Casey maupun Rowlinson dkk., melainkan merupakan konstruksi konseptual penelitian yang disusun berdasarkan pemahaman bahwa identitas, sejarah, memori, dan nilai bersama merupakan fondasi yang membentuk dan mempertahankan hubungan antarorganisasi. Selanjutnya, untuk menganalisis bagaimana relasi tersebut terbentuk, dipertahankan, dan mengalami perubahan intensitas, penelitian ini menggunakan teori jaringan sosial Mark Granovetter melalui konsep *strong ties*, *embeddedness*, dan *weak ties* sebagai pisau analisis utama.

³⁴ Rowlinson, M., Casey, A., Hansen, P. H., & Mills, A. J. (2014). *Narratives and Memory in Organizations*. *Organization*, Vol, 21 No. 4, hlm. 441.

2.1. Social Network Theory (Konsep *The Strength of Weak Ties* 1973) Mark S. Granovetter

Social Network Theory yang dikembangkan oleh Mark S. Granovetter menjelaskan bagaimana hubungan sosial (*networks*) menjadi saluran utama penyebaran informasi, pengaruh dan nilai-nilai di dalam masyarakat. Teori ini berangkat dari gagasan bahwa perilaku manusia tidak bisa dipahami hanya melalui ciri individu saja, tetapi harus dilihat dari posisi seseorang di dalam jaringan sosialnya.³⁵ Artinya, jaringan sosial menjadi struktur yang membentuk peluang, batasan, hingga arah tindakan seseorang dalam kehidupan sosial dan politik. Granovetter (1973) menegaskan bahwa hubungan tidak hanya sekadar saluran komunikasi, melainkan “*channels of access to resources, opportunities, and influence that are not evenly available to all.*”³⁶ Dengan kata lain, posisi seseorang di dalam jaringan menentukan seberapa besar ia dapat mengakses informasi, dukungan dan legitimasi sosial. Pada titik ini, jaringan tidak sekadar ruang interaksi, tetapi juga arena kekuasaan yang bekerja melalui kedekatan, kepercayaan dan persepsi. Jadi ketika setiap orang bergerak dalam lingkungan yang penuh koneksi keluarga, teman, guru, organisasi, maupun tokoh panutan dan koneksi inilah yang mempengaruhi orientasi politik, pilihan organisasi, hingga arah aktivitas dakwah.

Granovetter menekankan bahwa hubungan sosial dibedakan menjadi dua yaitu hubungan kuat (*strong ties*) dan hubungan lemah (*weak ties*).

³⁵ Granovetter, M.S., (1973). *The strength of weak ties*. American Journal of Sociology. Vol. 78, No. 6 (May, 1973), hlm. 1360-1362.

³⁶ Granovetter, M.S., (1973). *The strength of weak ties*. American Journal of Sociology. Vol. 78, No. 6 (May, 1973), hlm. 1371.

Hubungan kuat biasanya muncul dalam lingkup keluarga dekat, sahabat, atau kelompok yang sangat intens berinteraksi. Sementara hubungan lemah muncul dari kenalan, rekan organisasi, atau orang-orang yang jarang bertemu tetapi tetap terhubung.³⁷ Dalam konteks masyarakat modern, hubungan lemah justru lebih efektif untuk menyebarkan informasi baru, ide baru, atau ajakan politik, karena ia menghubungkan seseorang dengan jaringan yang lebih luas.

Dalam esainya yang sangat terkenal, "*The Strength of Weak Ties*," Granovetter (1973) berargumen bahwa jaringan lemah memiliki fungsi penting dalam menyebarkan inovasi sosial, termasuk mobilisasi politik, rekrutmen organisasi, serta penyebaran nilai-nilai keagamaan. Hal ini terjadi karena hubungan lemah memiliki akses ke kelompok sosial lain di luar lingkaran dekat seseorang.³⁸ Dengan kata lain, mereka menjadi jembatan antar komunitas (*bridging ties*). Ketika seseorang memiliki banyak jembatan ini, ia dapat membawa pengaruh, ide, atau nilai dari satu kelompok ke kelompok lainnya.

Dalam konteks ormas Islam dan partai politik seperti hubungan antara PERSIS dan Partai Bulan Bintang di Tasikmalaya, teori ini sangat relevan. Kader PERSIS yang aktif dalam kegiatan dakwah sering berinteraksi dengan *jama'ah* lintas kelompok, tokoh masyarakat dan anggota partai. Hubungan-hubungan ini bukan sekadar hubungan personal, tetapi menjadi jalur penyebaran nilai, orientasi politik dan identitas keislaman kepada jaringan

³⁷ Granovetter, M.S., (1973). *The strength of weak ties*. American Journal of Sociology. Vol. 78, No. 6 (May, 1973), hlm. 1361-1366.

³⁸ Granovetter, M.S., (1973). *The strength of weak ties*. American Journal of Sociology. Vol. 78, No. 6 (May, 1973), hlm. 1363.

yang lebih luas. Granovetter (1973) juga menjelaskan bahwa jaringan sosial menjadi kunci bagaimana kelompok dapat saling mempengaruhi tanpa harus memiliki hubungan struktural formal.³⁹

Selain itu, hubungan dakwah misalnya antara ustaz, santri, aktivis muda dan simpatisan partai, dapat berfungsi sebagai *strong ties*, yaitu koneksi intens yang membentuk kepercayaan dan kesamaan visi. Namun, dalam banyak kasus, proses penyebaran pengaruh justru terjadi melalui *weak ties*, seperti kenalan antar organisasi, alumni pesantren, atau pertemuan di kegiatan keagamaan. Jaringan lemah ini memudahkan transfer gagasan politik dari PERSIS ke PBB atau sebaliknya. Menurut Burt (2000), jaringan seperti ini disebut *structural holes*, yaitu celah yang menghubungkan dua kelompok berbeda melalui individu yang berada di posisi strategis.⁴⁰

Banyak pilihan politik anggota masyarakat terbentuk bukan oleh struktur organisasi, melainkan oleh siapa yang mereka kenal, siapa yang mereka percayai dan siapa yang menjadi panutan dalam jaringan mereka sehari-hari. Dengan demikian, *Social Network Theory* memberi kerangka untuk memahami bagaimana relasi sosial menghasilkan pengaruh kultural yang berlangsung secara halus dan informal. Granovetter (1985) juga memperkenalkan konsep "*embeddedness*," yaitu bahwa tindakan sosial, termasuk tindakan politik selalu tertanam dalam jaringan sosial.⁴¹ Tidak ada tindakan politik yang benar-benar "individu," semuanya dipengaruhi oleh

³⁹ Granovetter, M.S., (1973). *The strength of weak ties*. American Journal of Sociology. Vol. 78, No. 6 (May, 1973), hlm. 1370.

⁴⁰ Burt, R. S. (2000). *The Network Structure of Social Capital*. Vol. 22 (2000), hlm. 353).

⁴¹ Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology, Vol. 91, No. 3 (Nov., 1985), hlm. 482.

koneksi sosial, nilai kelompok dan hubungan yang telah dibangun. Dalam menganalisis jaringan sosial, penelitian ini tidak hanya menggunakan konsep *strong ties* dan *weak ties* dari Granovetter (1973), tetapi juga mengadopsi pendekatan *Social Network Analysis* (SNA) yang lebih luas untuk mengklasifikasikan posisi aktor dalam jaringan, seperti *core actors*, *broker actors*, dan *peripheral actors*.⁴² Klasifikasi ini digunakan sebagai alat analitis untuk memetakan peran dan posisi aktor dalam relasi kultural antara PERSIS dan Partai Bulan Bintang.

Teori ini juga digunakan untuk menjelaskan perubahan hubungan keduanya. Ketika aktor kunci jaringan (misalnya tokoh senior, ulama kharismatik, atau aktivis kader awal) mulai tidak aktif, berpindah afiliasi, atau meninggal, maka jaringan sosial yang dahulu menghubungkan PERSIS dan PBB mengalami pelemahan. Dalam perspektif Granovetter, hilangnya *bridging actors* dalam jaringan dapat menyebabkan terputusnya *weak ties*, sehingga informasi politik tidak lagi beredar secara intensif di lingkaran *jama'ah* atau komunitas yang sebelumnya terhubung. Hal ini menjelaskan mengapa meskipun secara historis hubungan keduanya dikenal dekat, pada konteks politik kontemporer relasi tersebut menjadi lebih cair, netral, atau bahkan tidak dianggap signifikan oleh generasi baru anggota PERSIS & PBB.

Dengan demikian, teori jaringan sosial memungkinkan penelitian ini tidak hanya menggambarkan hubungan masa lalu dan masa kini, tetapi juga memahami mekanisme sosial yang membentuk, mempertahankan dan

⁴² Borgatti, S. P., & Everett, M. G. (2000). *Models of core/periphery structures*. *Social Networks*, Vol. 21, No.4, hlm. 375s.d.395.

melemahkan hubungan tersebut. Dalam konteks Tasikmalaya, jaringan alumni pesantren PERSIS, kegiatan dakwah tahunan, relasi personal antar keluarga kader, serta peran media sosial religius menjadi variabel penting yang dapat dianalisis melalui lensa *Social Network Theory*. Teori ini juga memungkinkan peneliti untuk memetakan hubungan formal dan informal antara aktor, mengidentifikasi siapa saja yang menjadi *nodes* dan *brokers*, serta menjelaskan bagaimana transformasi sosial dalam komunitas Islam modernis mempengaruhi pilihan politik *jama'ah* dan orientasi partai.

Melalui pendekatan ini, hubungan PERSIS & PBB tidak dipahami sebagai hubungan organisasi yang bersifat mekanis, tetapi sebagai fenomena relasional yang terbentuk melalui jaringan sosial yang dinamis, terikat sejarah dan dapat mengalami perubahan sesuai konteks sosial & politik yang berkembang.

2.2. *Institutional Change Theory* (Konsep *Historical Institutionalism*)

Mahoney & Thelen,

Institutional Change Theory yang diperkenalkan oleh James Mahoney dan Kathleen Thelen (2010) merupakan salah satu pendekatan paling berpengaruh dalam tradisi *historical institutionalism*, yaitu pendekatan analisis politik yang memandang bahwa:

*“...institutions should not be realised as static but rather as dynamic and contested process that produce rules and distribute resources, which under certain circumstances can be challenged.”*⁴³

⁴³ Mahoney, J., Thelen, K. (2010). *Explaining institutional change: ambiguity, agency and power*, Cambridge University Press [Book review]. Social Development and Cohesion. Hlm.3.

Itu berarti bahwa institusi bukan sebagai sesuatu yang statis atau final, tetapi sebagai arena yang terus menghadapi tantangan, salah satunya yaitu mengalami perubahan akibat interaksi antara aktor, konteks dan kekuasaan dalam jangka waktu Panjang.

Perspektif ini menolak pandangan lama yang melihat perubahan institusi hanya terjadi melalui proses radikal seperti revolusi, konflik besar, atau reformasi struktural. Sebaliknya, Mahoney dan Thelen (2010) menekankan bahwa:

*“...each contributor highlights the importance of incremental, endogenous changes that unfold over time that is only exacerbated but not explained, by exogenous pressures.”*⁴⁴

Perubahan institusional sering kali berlangsung secara perlahan, bertahap dan kadang tidak kasat mata melalui mekanisme seperti *layering*,⁴⁵ *drift*⁴⁶ dan *conversion*,⁴⁷ namun efek akhirnya signifikan. Perubahan ini dapat terjadi bukan karena perubahan aturan formal, melainkan karena perubahan interpretasi, praktik sosial dan orientasi aktor yang berada di dalam atau di sekitar institusi. Namun, penelitian ini menyadari bahwa *Institutional Change Theory* dari James Mahoney dan Kathleen Thelen pada dasarnya dikembangkan untuk menjelaskan perubahan pada institusi formal. Oleh karena itu, teori ini tidak digunakan untuk menganalisis relasi kultural

⁴⁴ Mahoney, J., Thelen, K. (2010). *Explaining institutional change: ambiguity, agency and power*, Cambridge University Press [Book review]. Social Development and Cohesion. Hlm. 3.

⁴⁵ *Layering* itu ketika aturan lama tetap ada, tapi ditambah aturan atau praktik baru di atasnya.

⁴⁶ *Drift* itu terjadi ketika aturan tidak diubah, tapi konteks di sekitarnya berubah sehingga fungsi aturan itu ikut bergeser.

⁴⁷ *Conversion* itu ketika aturan lama tetap dipakai, tapi ditafsirkan dan dijalankan dengan tujuan baru oleh aktor-aktornya.

antara PERSIS dan Partai Bulan Bintang secara langsung, melainkan alasan mengadopsi perspektif perubahan kelembagaan (*institutional change perspective*) adalah sebagai landasan untuk memahami bahwa hubungan antara organisasi tidak bersifat statis, melainkan dapat berubah secara bertahap sesuai perkembangan konteks sosial dan politik.

Dengan kata lain, dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk memahami bagaimana perubahan orientasi dan dinamika dalam arena politik memengaruhi pola hubungan yang terjalin antara aktor-aktor dari kedua organisasi. Dengan demikian, perubahan relasi kultural dipahami sebagai konsekuensi sosial dari perubahan konteks institusional dan politik yang mempengaruhi cara aktor memaknai, menjalani dan merawat hubungan di luar struktur resmi. Sementara karakter relasi antaraktor dianalisis menggunakan *Social Network Theory* dari Mark S. Granovetter.

Dalam konteks penelitian ini, teori *Institutional Change* memberikan lensa analitis yang penting untuk memahami bagaimana hubungan kultural antara PERSIS dan PBB yang pada masa awal Reformasi dianggap sangat dekat, secara perlahan mengalami perubahan hingga menjadi lebih cair, netral, atau bahkan cenderung tidak terlihat pada saat ini. Pada masa awal berdirinya PBB, hubungan tersebut didorong oleh kesamaan identitas keislaman dan *shared ideological roots*, termasuk cita-cita menegakkan nilai Islam dalam ruang politik formal. Kesamaan tersebut kemudian diperkuat oleh jaringan sosial berupa alumni pesantren PERSIS, aktivis dakwah dan tokoh-tokoh lokal yang terlibat dalam transisi organisasi dakwah ke arena politik praktis. Dalam perspektif *Institutional Change*, fase ini dapat

dipahami sebagai fase *alignment* atau kesesuaian antara orientasi organisasi keagamaan dan partai politik yang lahir dari kultur yang sama.

Namun seiring berkembangnya konteks sosial-politik, perubahan kepemimpinan internal, serta dinamika kompetisi elektoral di Indonesia, hubungan ini mulai bergeser. Mahoney dan Thelen menjelaskan bahwa *“institutions once established are realised as distributional instruments laden with power implications.”*⁴⁸

Perubahan institusi sering kali dipicu oleh perubahan aktor kunci atau *key brokers*, perubahan lingkungan eksternal dan reinterpretasi terhadap norma institusional. Dalam konteks relasi PERSIS dan PBB, perubahan ini terlihat dari pergeseran sikap resmi PERSIS yang menegaskan posisi netral politik serta berkembangnya pilihan politik yang lebih beragam di kalangan *jama'ah*, terutama generasi muda.

2.3. Penelitian Terdahulu

2.3.1. Mutiullah, M. Y. N. (2024). *Religion and Politics in Indonesia: The Role of Kyai in the 2024 Election, Case Study on Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)*: Afkaruna Journal. Volume 20.

Artikel karya Muhammad Yaufi Nur Mutiullah (2024) ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik. Data yang digunakan bukan berasal dari observasi lapangan atau wawancara, tetapi dikumpulkan melalui sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta pemberitaan media yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan

⁴⁸ Mahoney, J., Thelen, K. (2010). *Explaining institutional change: ambiguity, agency and power*, Cambridge University Press [Book review]. Social Development and Cohesion, hlm.2.

untuk menguji variabel, tetapi untuk memahami pola hubungan antara otoritas keagamaan dan dinamika politik dalam konteks Pemilu 2024. Dalam analisisnya, peneliti menggunakan teori Clifford Geertz mengenai peran ahli agama sebagai *cultural brokers*, tokoh yang menjembatani praktik budaya dan struktur kekuasaan, termasuk dalam ranah politik.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa posisi kyai dalam masyarakat Indonesia tidak hanya terbatas pada domain keagamaan, melainkan juga merambah ke ranah sosial, budaya, ekonomi dan terutama politik. Fenomena ini disebut penulis sebagai “otoritas ganda” atau *dual authority*, di mana kyai berperan sebagai figur spiritual sekaligus aktor politik. Dalam konteks PKB, otoritas tersebut dimanfaatkan secara strategis melalui forum *Ijtima' Ulama Nusantara* sebagai instrumen legitimasi politik menjelang Pemilu 2024. Forum ini tidak hanya sebagai ruang konsolidasi internal, tetapi juga sebagai basis produksi fatwa politik yang kemudian diterjemahkan dalam arahan dukungan terhadap tokoh tertentu, dalam hal ini Muhaimin Iskandar. Kehadiran kyai dan jaringan pesantren dalam proses tersebut memperlihatkan bahwa aktor religius berfungsi sebagai agen mobilisasi politik yang efektif, didukung oleh pola relasi patronase dan kharisma yang sudah terbangun lama melalui hubungan santri.d.kyai.

Artikel ini memiliki relevansi penting dengan penelitian penulis mengenai hubungan kultural antara PERSIS dan Partai Bulan Bintang

di Tasikmalaya. Temuan Yaufi dapat digunakan sebagai referensi konseptual untuk memahami bagaimana organisasi Islam dan figur religius menjadi bagian dari dinamika pembentukan orientasi politik *jama'ah*. Melalui konsep *cultural brokerage*, penelitian ini memberikan kerangka bahwa hubungan agama dan politik tidak terjadi secara mekanis, melainkan melalui simbol, jaringan, nilai dan otoritas moral yang dibangun dalam kultur keagamaan tertentu. Dengan demikian, artikel ini dapat menjadi pembandingan untuk melihat apakah hubungan antara PERSIS & PBB mengikuti pola yang sama seperti relasi NU & PKB yang berbasis legitimasi otoritatif ulama atau justru berbeda karena karakter epistemik dan ideologi keagamaan PERSIS yang lebih skriptural, modernis dan cenderung rasional.

Dalam konteks tersebut, tulisan ini bukan hanya relevan sebagai referensi teoritik, tetapi juga membuka ruang analisis apakah hubungan PERSIS & PBB dibangun atas dasar kesinambungan kultural, loyalitas religius yang diwariskan, atau lebih bersifat pragmatis sesuai dinamika politik lokal Tasikmalaya. Dengan kata lain, penelitian ini menempatkan studi kasus penulis dalam peta wacana yang lebih luas mengenai politik Islam kontemporer di Indonesia.

- 2.3.2. Putri, A. (2016). *The roles of Islamic organizations in civil society and political society: Malaysia and Indonesia compared*. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*. *Journal Of Indonesian Social Sciences And Humanities (Jissh)*, Volume 6, Nomor 2.

Penelitian yang ditulis oleh Aisah Putri pada tahun 2016 ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada reformasi pemikiran Islam dalam konteks modernitas. Data yang digunakan berasal dari studi kepustakaan (*library research*), terutama melalui sumber akademik seperti buku, artikel ilmiah, serta dokumen pemikiran tokoh yang menjadi objek kajian. Karena penelitian ini bersifat konseptual bukan penelitian lapangan, maka metode analisis yang digunakan lebih bersifat interpretatif dan teoritis, bukan verifikatif. Penelitian ini pada dasarnya mencoba membaca ulang wacana pemikiran Islam dengan memeriksa relasi antara teks keagamaan, konteks sosial dan perubahan modernitas.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan atau reformasi pemikiran Islam tidak pernah berdiri di ruang kosong; ia selalu beriringan dengan perubahan sosial dan politik di mana umat Islam berada. Modernitas, rasionalisme dan transformasi sosial menjadi pemicu utama munculnya reinterpretasi ajaran keagamaan, baik dalam bentuk pemurnian, liberalisasi pemikiran, maupun proses negosiasi antara tradisi dan perubahan. Penelitian ini menekankan bahwa modernisme Islam berkembang bukan hanya sebagai kritik terhadap tradisi keagamaan yang dianggap statis, tetapi juga sebagai respon terhadap realitas sosial-politik umat Islam yang terus berubah. Dengan demikian, reformasi pemikiran Islam dipahami sebagai proses dialektis antara kontinuitas tradisi dan tuntutan zaman.

Relevansi penelitian ini terhadap skripsi penulis sangat terasa pada aspek bagaimana gagasan keagamaan membentuk orientasi politik dan budaya organisasi Islam. Meskipun studi ini tidak berbicara langsung mengenai relasi ormas Islam dan partai politik, pemikiran yang dibahas memberikan fondasi epistemologis untuk memahami bagaimana basis pemikiran sebuah organisasi Islam dapat mempengaruhi arah politik dan identitas sosial anggotanya. Dalam konteks penelitian penulis tentang hubungan kultural antara PERSIS dan Partai Bulan Bintang di Tasikmalaya, artikel ini menjadi rujukan konseptual untuk menjelaskan posisi ideologis organisasi Islam, khususnya bagaimana kerangka pemikiran keagamaan (modernis, tekstual, reformis, atau puritan) dapat mempengaruhi kedekatan atau jarak organisasi terhadap partai politik tertentu.

Dengan kata lain, penelitian ini membantu penulis melihat bahwa relasi agama dan politik, terutama pada ormas berbasis ideologi keagamaan seperti PERSIS, tidak hanya dapat dijelaskan melalui faktor historis dan jaringan sosial, tetapi juga melalui cara organisasi tersebut memaknai Islam, memahami otoritas keagamaan dan merespons dinamika perubahan sosial. Di titik ini, penelitian Aisah Putri membuka ruang tafsir bahwa hubungan antara PERSIS dan PBB mungkin tidak sekadar hubungan instrumental atau pragmatis seperti model NU & PKB, tetapi bisa bersifat ideologis, epistemik, bahkan normatif sesuai tradisi pembaruan pemikiran Islam yang menjadi identitas PERSIS.

- 2.3.3. Ikhwan, H., (2018). *FITTED SHARIA IN DEMOCRATIZING INDONESIA. JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM. Volume 12, Nomor 1*

Artikel “*Fitted Sharia in Democratizing Indonesia*” menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kerja lapangan (*fieldwork*) di Cianjur dengan metode wawancara terhadap 59 informan dari berbagai kalangan seperti birokrat, politisi, peneliti, tokoh agama, hingga organisasi pemuda. Pendekatan ini membuat penelitian bersifat deskriptif-analitis, di mana penulisnya tidak hanya mendokumentasikan fenomena, tetapi juga menafsirkan bagaimana dinamika politik, agama dan demokrasi saling mempengaruhi dalam proses lahirnya regulasi syariah. Data empiris penelitian ini kemudian dipadukan dengan kerangka teoritis post-strukturalisme Laclau & Mouffe mengenai demokrasi, politik identitas dan negosiasi makna yang terus bergerak.

Temuan utamanya menunjukkan bahwa regulasi syariah yang muncul di Cianjur bukanlah bentuk penerapan syariah yang rigid dan tunggal seperti dalam narasi Islamisme normatif, tetapi lebih merupakan “sharia yang *difitting* secara lokal,” produk negosiasi antara aktor Islamis, elite politik sekuler, struktur sosial masyarakat dan simbol budaya setempat. Hal penting lainnya adalah bahwa dukungan terhadap kebijakan ini tidak hanya datang dari partai Islam, tetapi juga partai nasionalis sekuler yang secara pragmatis memanfaatkan simbol syariah untuk modal politik, jejaring Ulama dan mobilisasi elektoral.

Dalam konteks itu, Partai Bulan Bintang (PBB) termasuk salah satu partai yang pernah terlibat, meskipun pada akhirnya kehilangan kursi karena dinamika elektoral setelah 2005. Relevansinya dengan penelitian penulis sangat kuat. Pertama, artikel ini menunjukkan bagaimana hubungan antara agama, partai Islam dan institusi politik bukanlah relasi yang statis, tetapi terbentuk melalui negosiasi, kompromi dan pembingkai ulang identitas, sebuah dinamika yang juga terlihat dalam hubungan kultural PERSIS & PBB di Tasikmalaya yang sedang penulis teliti. Kedua, temuan bahwa partai Islam tidak selalu menjadi penentu tunggal gerakan Islam politik dan kadang justru aktor sekuler yang mengkapitalisasi simbol agama, memberikan kerangka analitis penting untuk memahami apakah hubungan PERSIS & PBB bergerak dari ideologis ke pragmatis, dari simbiosis ke adaptif, atau bahkan ke bentuk disengagement. Ketiga, artikel ini membuka ruang analisis tentang bagaimana identitas keagamaan digunakan secara politis, bukan hanya sebagai ajaran tetapi sebagai strategi elektoral.

- 2.3.4. Mufti, M. (2023). *Redrawing the Diverse of Muslim Politics: Study on Political Attitude of Islamic Political Parties in Indonesia*. *Journal. USHULUNA: JURNAL ILMU USHULUDDIN*. Volume 9, Nomor 2.

Artikel berjudul "*Redrawing the Diverse of Muslim Politics: Study on Political Attitude of Islamic Political Parties in Indonesia*" karya Muhammad Mufti (2023) ini menggunakan metode penelitian kualitatif

dengan teknik pengumpulan data berbasis studi pustaka. Penulis memusatkan analisisnya pada penelusuran pemikiran dan perkembangan politik Islam secara historis, lalu menghubungkannya dengan konteks Indonesia kontemporer. Sumber yang digunakan berupa buku-buku teori Islamisme, seperti karya Bassam Tibi dan Salwa Ismail serta literatur mengenai transformasi partai politik Islam di Indonesia. Secara metodologis, penelitian ini bersifat konseptual-analitis karena tidak meneliti satu partai secara tunggal, melainkan memetakan pola berpikir, orientasi ideologi dan kecenderungan praksis di antara berbagai partai Islam sebagai representasi politik Muslim.

Temuan utama artikel ini menunjukkan bahwa politik Muslim bersifat sangat beragam dan tidak dapat direduksi pada konsep tunggal atau pengalaman universal. Keragaman tersebut dipengaruhi oleh konteks sejarah, kondisi sosial-ekonomi, hingga pengalaman kolonial dan globalisasi. Dalam konteks Indonesia, penulis menunjukkan bahwa identitas politik Islam tidak pernah statis: mulai dari fase perlawanan terhadap kolonialisme, masa penyatuan melalui Masyumi, represi Orde Baru, hingga era Reformasi yang ditandai oleh fragmentasi dan pluralisasi partai Islam. Dalam perkembangan terbaru, penulis menemukan bahwa kecenderungan politik Islam di Indonesia bergerak ke arah moderasi. Hal ini tampak dari kecenderungan partai-partai Islam untuk mengadopsi ide demokrasi, pluralisme dan kerja sama lintas partai, bahkan dengan kelompok sekuler demi adaptasi elektoral. Dengan demikian, keberadaan partai Islam saat ini tidak lagi berwatak

ideologis kaku, tetapi bergeser menjadi pragmatis, fleksibel dan berorientasi representasi sosial.

Penelitian ini memiliki relevansi kuat dengan topik skripsi penulis mengenai hubungan kultural antara PERSIS dan Partai Bulan Bintang (PBB) di Tasikmalaya. Artikel ini memberikan konteks teoretis bahwa identitas politik Islam, termasuk di tingkat lokal tidak lahir semata-mata dari platform ideologi, tetapi merupakan hasil interaksi antara doktrin keagamaan, pengalaman historis dan dinamika politik kontemporer.

Dengan temuan bahwa partai Islam kini cenderung moderat dan pragmatis, penelitian ini memberikan landasan untuk mengkaji apakah hubungan PERSIS & PBB masih berbasis historis-ideologis sebagaimana akar PBB dalam gerakan Islam modernis (Masyumi), atau justru telah bergeser menjadi relasi pragmatis, simbolik, atau bahkan melemah karena perubahan orientasi politik Muslim modern. Selain itu, artikel ini membantu menempatkan fenomena hubungan ormas Islam dan partai politik bukan sebagai relasi institusional linear, tetapi sebagai ruang negosiasi makna, identitas dan strategi politik dalam konteks demokrasi Indonesia yang terus berubah.

- 2.3.5. Adlin. (2020) PENURUNAN SUARA PARTAI ISLAM PADA PEMILU LEGISLATIF: PARTAI BULAN BINTANG (PBB) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019. *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam*. Volume 16 Nomor 2.

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi dokumentasi, di mana data diperoleh dari buku, jurnal dan pemberitaan

media daring yang relevan dengan dinamika politik Partai Bulan Bintang (PBB) pada Pemilu 2019. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis Miles & Huberman, yaitu melalui proses reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tidak ada wawancara lapangan, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan berbasis interpretasi sumber sekunder, bukan penelitian empiris langsung.

Temuan utamanya menunjukkan bahwa penurunan suara PBB bukan semata-mata karena lemahnya mesin partai atau fragmentasi politik, tetapi terutama karena keputusan elit partai, khususnya Yusril Ihza Mahendra yang memilih mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. Keputusan ini dianggap berseberangan dengan aspirasi basis konstituen PBB yang berasal dari komunitas Islam modernis yang sejak awal terafiliasi dengan garis dukungan Ijtima' Ulama II yang mendukung Prabowo-Sandi.

Keputusan tersebut memunculkan reaksi luas, mulai dari mundurnya caleg, hilangnya dukungan ulama, hingga beralihnya massa simpatisan ke partai lain. Penelitian ini juga menyoroti bahwa pemilih Islam modernis kini cenderung lebih independen dan ideologis, sehingga tidak otomatis mengikuti instruksi partai apabila keputusan partai dianggap tidak selaras dengan nilai perjuangan atau simbol agama yang diinternalisasi pemilih.

Relevansi penelitian ini dengan topik skripsi penulis tampak pada dua sisi. Pertama, artikel ini memperlihatkan pola hubungan antara

aktor keagamaan (ulama), basis kultural Islam modernis dan keputusan politik partai, yang merupakan aspek penting jika meneliti hubungan kultural antara PERSIS dan Partai Bulan Bintang, khususnya pada konteks Tasikmalaya. Kedua, penelitian ini menunjukkan bagaimana identitas keagamaan, legitimasi moral dan persepsi representasi aspirasi umat dapat menentukan arah dukungan terhadap partai Islam. Ini dapat menjadi pijakan teoritis untuk menjelaskan perubahan relasi kultural PERSIS-PBB, terutama ketika keputusan politik partai dianggap tidak mencerminkan identitas ideologis komunitas pendukungnya.

Dengan kata lain, studi ini membantu menjelaskan mengapa hubungan kultural antara komunitas Islam dan partai politik dapat menguat, melemah, atau berubah orientasi, serta bagaimana keputusan strategis elit politik dapat memutuskan atau mempertahankan hubungan identitas tersebut dalam konteks kontestasi politik lokal maupun nasional.

- 2.3.6. Ida, R., Mashud, M., Saud, M. Yousaf, F. N. & Ashfaq, A. (2025) *Politics in Indonesia: democracy, social networks and youth political participation*. Cogent Social Sciences. Volume 11, Nomor 1.

Artikel *Politics in Indonesia: Democracy, Social Networks and Youth Political Participation* menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma positivistik. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada 308 responden mahasiswa usia 18-29 tahun dari berbagai universitas besar seperti UI, UGM, ITB, UNAIR, ITS dan UINSA. Teknik sampling yang digunakan adalah *multistage sampling* dan analisis

datanya dilakukan melalui SPSS dengan analisis deskriptif, korelasi Pearson, regresi linier dan *multinomial logistic regression*. Variabel yang diukur meliputi intensitas penggunaan jejaring sosial, keterlibatan dalam aktivitas politik, *political efficacy*, serta bentuk interaksi sosial online maupun offline. Dengan kata lain, metode penelitian ini berfokus pada mengukur gejala sosial secara terukur, bukan memahami maknanya secara kualitatif.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa jejaring sosial (baik hubungan keluarga, pertemanan, maupun *platform* digital) memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan partisipasi politik anak muda di Indonesia. Pemuda yang terlibat dalam jejaring sosial lebih cenderung mengikuti kampanye, demonstrasi, diskusi publik dan aktivitas politik lainnya. Mereka juga menunjukkan tingkat *political efficacy* yang lebih tinggi, artinya mereka merasa suara mereka penting dan mampu mempengaruhi struktur politik. Namun, penelitian juga menemukan paradoks: meski generasi muda aktif dan terhubung dalam jaringan politik, tetap ada rasa skeptis terhadap respons pemerintah terhadap aspirasi publik, menunjukkan adanya jarak antara partisipasi dan representasi. Di sisi lain, hasil uji korelasi memperkuat bahwa semakin kuat jaringan sosial seseorang, semakin tinggi pula kemungkinan ia terlibat dalam politik.

Relevansi penelitian ini terhadap studi penulis sangat kuat terutama karena penulis menulis tentang hubungan kultural PERSIS & PBB di Tasikmalaya dan keterkaitannya dengan politik lokal serta dinamika

keberagamaan. Artikel ini memberi landasan bahwa jejaring sosial baik berbasis agama, organisasi, maupun hubungan kekerabatan, bukan hanya ruang sosial, tetapi juga arena politisasi identitas dan mobilisasi politik. Jika PERSIS dan PBB di Tasikmalaya memiliki hubungan kultural, maka jejaring sosial keagamaan dapat dipahami sebagai medium reproduksi orientasi politik, legitimasi dan dukungan elektoral. Temuan ini menjadi argumen bahwa hubungan kultural tidak hanya simbolis atau ideologis, tetapi memiliki fungsi mobilisasi politik yang konkret, mirip pola yang ditemukan dalam interaksi pemuda di media sosial dalam artikel tersebut.

- 2.3.7. Tabina, A. S. P., Fahadayna, A. C. & Aminuddin, M. F. (2025). *A Religious Parties and the Construction of Political Identity: A Comparative Study of Indonesia and Türkiye Comparative Study of Indonesia and Türkiye*. JURNAL POLITIK. Volume 11, Nomor 1.

Artikel “*Religious Parties and the Construction of Political Identity: A Comparative Study of Indonesia and Türkiye*” ditulis dengan pendekatan kuantitatif komparatif, menggunakan desain Most Similar System Design (MSSD) untuk membandingkan bagaimana partai berbasis agama PKS di Indonesia dan AKP di Turki membentuk identitas politik dalam konteks negara dengan mayoritas Muslim tetapi sistem politik yang berbeda. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder, terutama dataset V-Dem, hasil pemilu resmi dari KPU dan YSK, serta beberapa indikator institusional yang kemudian diuji melalui analisis regresi linier guna melihat pengaruh variabel

representasi agama, jaringan asosiasi, pendidikan politik dan identitas politik berbasis agama terhadap pembentukan identitas politik pemilih. Dengan demikian, metode penelitian ini sangat terstruktur, numerik dan bertujuan menguji hubungan antarvariabel, bukan menelusuri makna atau konteks kultural secara mendalam.

Temuan utamanya menunjukkan hasil yang kontras antara dua negara. Di Indonesia, tiga variabel, representasi agama, pendidikan politik yang diproduksi partai dan identitas politik berbasis agama terbukti signifikan dalam membentuk identitas politik pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa partai seperti PKS memproduksi identitas melalui dakwah, pendidikan politik, simbol-simbol religius dan jejaring sosial keislaman. Identitas politik berbasis agama di Indonesia tidak hanya ideologis, tetapi mengakar dalam jaringan sosial dan institusi pendidikan Islam seperti pesantren serta gerakan dakwah.

Sementara itu di Turki, tidak ada variabel yang menunjukkan signifikansi statistik. Meskipun AKP berakar pada nilai Islam, identitas politik pemilih di Turki lebih didasarkan pada nasionalisme populis, figur pemimpin dan relasi dengan institusi negara, bukan pada jaringan keagamaan independen. Identitas politik di Turki lebih "disiplin negara" daripada "digerakkan komunitas" akibat warisan sekularisme yang kuat dan peran Diyanet sebagai institusi agama negara. Kesimpulannya, agama berpengaruh pada politik dengan cara yang berbeda: di Indonesia melalui jaringan sosial keagamaan yang cair, sedangkan di Turki melalui narasi populisme negara yang membungkus

identitas Islam sebagai simbol nasional, bukan identitas politik komunitas.

Relevansi penelitian ini terhadap topik skripsi penulis sangat kuat terutama pada dua lapisan. Pertama, penelitian ini menegaskan bahwa identitas politik berbasis agama bukan sesuatu yang natural atau otomatis, tetapi dibangun melalui institusi, jaringan sosial, pendidikan kader dan bahasa simbolik. Dalam konteks Tasikmalaya, ini membantu menjelaskan kenapa hubungan kultural PERSIS & PBB bukan hanya soal ideologi formal atau garis perjuangan Islam, tetapi terkait jaringan sosial, otoritas keagamaan dan pola sosialisasi kader di akar rumput. Kedua, artikel ini memberi kerangka bahwa kekuatan partai Islam di level lokal bergantung pada kedalaman relasi sosialnya dengan komunitas keagamaan, sesuatu yang terlihat di PBB Tasikmalaya dan pengaruh PERSIS sebagai arena pembentukan habitus politik.

- 2.3.8. Mahendra, S. P., Saudin, B. M., Loeca, H., Al Busthomi, M. Y. (2025). *Islamic Political Communication In The Digital Era: A Study On The Media Social Islamic Mass Organizations of Indonesia: Journal of Political Islam (JOPI). Volume 1, Nomor 1.*

Penelitian berjudul *Islamic Political Communication in the Digital Era* ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi non-partisipatif, analisis konten digital media sosial, serta wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara *purposive*. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber, sementara analisis dilakukan secara tematik dan induktif,

sehingga temuan tidak lahir dari hipotesis awal, tetapi dari pola yang muncul selama proses analisis. Fokus penelitian ini bukan pada partai politik Islam, tetapi pada empat ormas Islam utama yakni NU, Muhammadiyah, FPI dan PA 212 sebagai aktor strategis dalam membentuk opini publik dan identitas politik melalui media digital.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi masyarakat Islam di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dalam cara mereka berpolitik: dari sekadar wadah dakwah dan pelayanan sosial menjadi aktor politik strategis yang memainkan fungsi framing, mobilisasi dan pembentukan opini publik, terutama lewat media digital.

Strategi komunikasi yang digunakan beragam, NU dan Muhammadiyah cenderung menggunakan pendekatan moderatif, edukatif dan institusional, sedangkan FPI serta PA 212 bergerak dalam pola populis, emosional dan konfrontatif. Media sosial tidak hanya dipakai sebagai ruang penyampaian pesan, tetapi juga sebagai arena pembentukan identitas keagamaan yang sekaligus bernuansa politik. Penelitian ini juga menemukan bahwa Generation Z menjadi target utama, karena karakter mereka yang *digital native*, responsif terhadap narasi visual dan memiliki kebutuhan identitas kolektif. Hal ini membuat media sosial tidak hanya menjadi media informasi, tetapi juga ruang reproduksi politik identitas berbasis agama.

Relevansinya dengan penelitian penulis sangat jelas. Pertama, penelitian ini memperkuat argumen bahwa dalam politik Islam

kontemporer di Indonesia, politik tidak hanya berlangsung melalui partai, tetapi juga melalui jaringan sosial keagamaan dan narasi identitas yang dikelola oleh ormas. Ini sangat sejalan dengan topik hubungan kultural PERSI & PBB yang sedang penulis kaji, karena PBB sebagai partai yang mewarisi tradisi Masyumi tidak bisa dilepaskan dari jaringan sosial-keagamaan modernis termasuk PERSIS. Dengan kata lain, hubungan kultural bukan sekadar sejarah ideologis, tetapi juga merupakan mode komunikasi politik dan reproduksi loyalitas sosial melalui simbol agama.

Kedua, penelitian ini memberi landasan bahwa dalam konteks demokrasi dan digitalisasi, hubungan antara ormas Islam dan aktor politik tidak lagi bersifat struktural atau formal, tetapi simbolik, naratif dan berlangsung di ruang digital. Ini membuka peluang bagimu untuk menganalisis apakah hubungan kultural PERSIS & PBB bergerak ke arah pelestarian identitas, strategi elektoral, atau simbol representasi moral di ruang publik, khususnya dalam media sosial dan ruang komunikasi publik di Tasikmalaya.

- 2.3.9. Fernando, H. Larasati, Y. G., Abdullah, I., Jubba, H., Mugni, A. & Persadha, P. D., (2023). *The de-existence of Islamic political parties in general elections: A case study of Indonesia as a Muslim-majority country*. *Cogent Social Sciences*. Volume 9, Nomor. 1.

Artikel *The De-Existence of Islamic Political Parties in General Elections: A Case Study of Indonesia as a Muslim-Majority Country* ditulis dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi

pustaka (*library research*). Penulis tidak menggunakan survei atau observasi lapangan, tetapi mengumpulkan data dari dokumen sejarah, hasil pemilu, publikasi akademik, literatur politik Islam, serta data resmi KPU. Pendekatan analisisnya bersifat *interpretative*, penulis mencoba membaca fenomena politik partai Islam bukan hanya sebagai data elektoral, tetapi sebagai gejala sosial yang berubah karena faktor sejarah, ideologi dan dinamika pemilih Muslim di Indonesia.

Secara teori, artikel ini bertumpu pada tiga landasan: *Teori Political Islam dan Party Decline*, yaitu bagaimana partai Islam melemah bukan karena hilangnya identitas keagamaan, tetapi karena perubahan perilaku pemilih Muslim dan strategi politik actor; Teori Demokrasi dan Konsolidasi Politik dalam demokrasi kompetitif, partai harus beradaptasi terhadap preferensi pemilih, bukan hanya membawa identitas ideologis dan *The Sociology of Voters dan Political Behavior*, terutama mengenai pergeseran pemilih Muslim dari *ideological voting* menuju *pragmatic, policy-based dan personality-based voting*.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa melemahnya partai Islam di Indonesia bukan berarti Islam tidak lagi relevan dalam politik, tetapi justru menandai transformasi baru. Islam tetap hadir dalam politik, tetapi melalui simbol, jaringan sosial, ormas keagamaan dan identitas kultural, bukan lagi melalui platform formal partai politik Islam. Pemilih Muslim kini tidak memilih partai berdasarkan identitas agama secara otomatis, tetapi berdasarkan kinerja, figur pemimpin,

kedekatan jaringan sosial (tokoh agama), serta isu moral tertentu. Dengan demikian, politik Islam tidak hilang, ia hanya berubah bentuk.

Relevansinya dengan penelitian penulis sangat kuat. Artikel ini memberi kerangka penjelasan bahwa hubungan antara PERSIS dan PBB di Tasikmalaya tidak bisa hanya dibaca sebagai hubungan ideologis yang statis seperti era Masyumi, tetapi sebagai hubungan kultural yang terus dinegosiasikan dalam konteks politik demokratis. Temuan artikel ini dapat memperkuat argumen bahwa keterhubungan PERSIS & PBB saat ini mungkin tidak lagi bersifat elektoral langsung, tetapi lebih sebagai warisan identitas, jejaring kultural-keagamaan, atau simbol representasi moral, yang kadang tidak linear dengan pilihan politik pemilih Muslim modernis hari ini.

2.3.10. Nurish, A. (2024). *Transnational Islamic Networks in Indonesia: Imagining Political Trajectory in 2024*. COMPOSE (Center of Muslims Politic and World Society) Working Paper No. 008.

Artikel “*Transnational Islamic Networks in Indonesia: Imagining Political Trajectory in 2024*” ditulis menggunakan pendekatan kualitatif antropologis dengan metode *digital ethnography* sebagai teknik utama pengumpulan data. Penulis memadukan observasi daring terhadap aktivitas dakwah digital, konten media sosial, situs web, serta berita online dengan wawancara mendalam, *Focus Group Discussion (FGD)* dan studi literatur. Pendekatan ini membuat penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena transnasionalisme Islam secara permukaan, tetapi mencoba membaca bagaimana ideologi politik,

jaringan internasional dan ekspresi keagamaan diproduksi, dikonsumsi dan dinegosiasikan di ruang publik digital.

Secara teoretis, artikel ini bertumpu pada konsep transnasionalisme, diaspora dan politik identitas, terutama dari pemikiran Mandaville, Vertovec dan Cerny, serta teori Islamisme kontemporer yang melihat gerakan Islam bukan hanya melalui partai politik formal, tetapi juga melalui jaringan ideologi, simbol dan ruang wacana. Kerangka pemikirannya menunjukkan bahwa ekspresi politik Islam tidak hilang ketika partai atau organisasi formal dibubarkan; justru identitas dan agenda mereka berpindah ke bentuk kultural, jaringan sosial dan platform digital. Dengan kata lain, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa Islam politik hari ini bekerja melalui normalisasi simbol, bukan sekadar kendaraan elektoral.

Temuan utama penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun beberapa organisasi transnasional seperti HTI, JI dan FPI telah dibubarkan oleh negara, gagasan politik Islam yang mereka bawa justru tidak hilang. Ideologi tersebut tetap beredar melalui jaringan dakwah digital, komunitas berbasis simpatisan dan figur publik yang berperan sebagai node penghubung. Penelitian ini menemukan bahwa kelompok transnasional lebih memilih strategi "*soft resistance*," yaitu penggunaan narasi moral, retorika keumatan, kampanye identitas, serta wacana anti-korupsi dan anti-elit sebagai alat legitimasi politik. Identitas politik berbasis Islam tetap hidup bukan melalui partai politik Islam secara langsung, tetapi melalui ekosistem digital, ruang dakwah,

regulasi berbasis syariah di daerah, serta kultur konsumsi halal yang semakin menguat. Dalam konteks kontestasi menuju Pemilu 2024, kelompok ini tidak tampil sebagai peserta formal pemilu, tetapi sebagai aktor yang memengaruhi opini politik, agenda publik dan dukungan terhadap kandidat tertentu melalui simbol agama.

Relevansi penelitian ini dengan topik penulis sangat kuat, terutama karena artikel ini mempertegas bahwa hubungan antara organisasi keagamaan dan politik Islam tidak selalu berbentuk formal atau institusional. Dalam konteks hubungan kultural PERSIS & PBB di Tasikmalaya, artikel ini membantu menjelaskan bahwa perubahan relasi tersebut mungkin tidak lagi bisa dibaca melalui struktur organisasi atau dukungan elektoral langsung. Sebaliknya, hubungan itu mungkin kini bergerak melalui jaringan sosial keagamaan, simbol identitas modernis Islam, komunikasi digital dan representasi nilai yang terbentuk lewat memori sejarah (Masyumi-isme), kedekatan ideologi, serta narasi moral yang dikonstruksi di ruang publik. Dengan demikian, artikel ini memperkuat argumenmu bahwa dalam iklim politik kontemporer, kedekatan antara ormas Islam dan partai politik Islam semakin fleksibel, cair dan berbasis kultur, bukan ketaatan struktural. Identitas politik tidak lagi diwariskan secara otomatis, ia dinegosiasikan melalui media, tokoh dan konteks lokal persis seperti dinamika yang sedang penulis teliti di Tasikmalaya.

2.4. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berpijak pada pemahaman bahwa hubungan antara organisasi keagamaan dan partai politik tidak selalu hadir dalam bentuk struktur formal yang tegas, melainkan sering kali hidup dalam ruang yang lebih halus: nilai, ingatan, jaringan sosial dan praktik keseharian. Relasi antara Persatuan Islam (PERSIS) dan Partai Bulan Bintang (PBB) di Kota Tasikmalaya tidak dapat dibaca semata-mata sebagai hubungan organisatoris, tetapi sebagai hubungan kultural yang tumbuh dari kesamaan identitas keislaman, sejarah ideologis dan interaksi sosial yang berlangsung lintas generasi.

Pada fase awal Reformasi, kedekatan antara PERSIS dan PBB bertumpu pada identitas nilai keislaman dan historis yang sama. Keduanya berbagi akar pemikiran Islam modernis yang merujuk pada warisan Masyumi serta figur-figur intelektual Muslim seperti Mohammad Natsir. Identitas ini tidak bekerja sebagai doktrin formal yang memaksa, melainkan sebagai *shared meaning* (makna bersama) yang mengalir dalam ruang dakwah, pendidikan dan pergaulan sosial umat. Nilai keislaman yang diyakini PERSIS menemukan resonansinya dalam visi politik PBB yang berupaya mentransformasikan Islam ke dalam ruang kebijakan publik.

Dalam konteks inilah *Social Network Theory* yang dikembangkan oleh Mark S. Granovetter menjadi kunci untuk memahami bagaimana hubungan tersebut terbentuk dan menguat. Granovetter menegaskan bahwa tindakan sosial tidak dapat dilepaskan dari jaringan hubungan tempat individu berada. Dalam tulisannya yang klasik, ia menyatakan bahwa:

*“Analysis of social networks is suggested as a tool for linking micro and macro levels of sociological theory.”*⁴⁹

Hubungan antara PERSIS dan PBB pada masa awal tidak digerakkan oleh instruksi kelembagaan, melainkan oleh jaringan sosial yang mempertemukan tokoh-tokoh agama, kader dakwah, alumni pesantren dan aktivis politik dalam ruang yang sama. Para ustaz, dai dan tokoh PERSIS yang memiliki kedekatan personal dengan PBB berperan sebagai *nodes* dan *brokers* (perantara) dalam jaringan tersebut. Mereka menjadi penghubung antara dunia dakwah dan dunia politik, menyebarkan nilai, preferensi dan orientasi politik melalui hubungan sosial yang bersifat informal.

Granovetter membedakan hubungan sosial menjadi *strong ties* dan *weak ties*. Hubungan kuat muncul dalam lingkaran intens seperti keluarga, *jama'ah* inti dan kader senior, sementara hubungan lemah justru menjembatani kelompok yang berbeda dan memungkinkan penyebaran pengaruh yang lebih luas. Ia menulis:

*“From the individual's point of view, then, weak ties are an important resource in making possible mobility opportunity. Seen from a more macroscopic vantage, weak ties play a role in effecting social cohesion.”*⁵⁰

Dalam konteks PERSIS dan PBB, hubungan lemah seperti pertemuan lintas organisasi, jaringan alumni dan interaksi dakwah non-formal justru berperan besar dalam memperluas pengaruh politik PBB di kalangan *jama'ah* PERSIS. Melalui jaringan inilah, hubungan awal PERSIS dan PBB tampak

⁴⁹ Granovetter, M.S., (1973). *The strength of weak ties*. American Journal of Sociology. Vol. 78, No. 6 (May, 1973), hlm. 1360

⁵⁰ Granovetter, M.S., (1973). *The strength of weak ties*. American Journal of Sociology. Vol. 78, No. 6 (May, 1973), hlm. 1373

dekat, menyatu dan sulit dibedakan secara tegas antara ruang dakwah dan ruang politik.

Namun, kerangka pemikiran penelitian ini tidak berhenti pada fase kedekatan tersebut. Hubungan sosial dan politik tidak pernah statis. Ia bergerak mengikuti perubahan konteks, aktor dan strategi. Seiring berjalannya waktu, perubahan lingkungan politik, pergantian aktor kunci, serta diversifikasi pilihan politik *jama'ah* mulai menggeser bentuk relasi yang sebelumnya erat.

Untuk membaca proses perubahan ini, penelitian ini menggunakan *Institutional Change Theory* dari Mahoney dan Thelen. Berbeda dari pandangan yang melihat perubahan institusi sebagai peristiwa drastis, Mahoney dan Thelen menekankan bahwa perubahan sering kali berlangsung perlahan, bertahap dan tersembunyi dalam praktik keseharian. Mereka menulis:

*“Institutions are not static constraints but are continually shaped and reshaped by actors through ongoing struggles over interpretation and enforcement.”*⁵¹

Dalam perspektif ini, institusi dipahami bukan hanya sebagai aturan formal, tetapi sebagai gabungan antara aturan, norma, memori kolektif dan praktik yang dilembagakan. Hubungan PERSIS dan PBB dapat dibaca sebagai bagian dari institusi kultural yang hidup dalam jaringan dakwah dan politik lokal Tasikmalaya. Ketika konteks politik berubah, misalnya melalui pergantian kepemimpinan PBB, menguatnya sikap netral politik PERSIS, serta

⁵¹ Mahoney, J., Thelen, K. (2010). *Explaining institutional change: ambiguity, agency and power*, Cambridge University Press [Book review]. Social Development and Cohesion. Hlm.3.

munculnya generasi muda dengan preferensi politik yang lebih cair, institusi hubungan tersebut mulai mengalami perubahan.

Proses ini tidak menghasilkan konflik terbuka atau pemutusan hubungan secara formal. Sebaliknya, ia melahirkan kondisi netralitas kultural, di mana hubungan PERSIS dan PBB tidak sepenuhnya hilang, tetapi hadir sebagai memori historis, bukan sebagai praktik sosial yang aktif. Akhirnya, kerangka pemikiran ini menempatkan hubungan PERSIS dan PBB sebagai fenomena sosial yang bergerak dari identitas nilai bersama, menuju kedekatan berbasis jaringan sosial, lalu mengalami perubahan institusional bertahap hingga mencapai kondisi relasi yang lebih netral dan cair pada konteks kekinian. Melalui kombinasi *Social Network Theory* dan *Institutional Change Theory*, penelitian ini tidak hanya menjelaskan “apa” yang berubah, tetapi “bagaimana” dan “mengapa” perubahan tersebut berlangsung dalam ruang sosial-politik Islam lokal di Tasikmalaya.